

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Sistem

Umar Fahmi Ahmadi Mengatakan bahwa sistem adalah tatanan yang menggambarkan adanya rangkaian berbagai komponen yang memiliki hubungan serta tujuan bersama secara serasi, terkoordinasi yang bekerja atau berjalan dalam rangka waktu tertentu dan terencana.

2.2. Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan dan pelaporan transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna. Transaksi-transaksi bisnis tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Kieso dan Weygandt mendefinisikan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang dimulai dari mengklarifikasi, pencatatan dan mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi dari organisasi atau perusahaan ke pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut.

2.3. Definisi Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi merupakan sebuah ikhtisar catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan dengan tujuan mengkategorikan, rekaman, menganalisis dan melaporkan informasi manajemen keuangan agar tepat waktu.

Mulyadi (2016) mengatakan pengertian Sistem Akuntansi adalah Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.

2.3.1. Tujuan Sistem Akuntansi

Tujuan umum penyusunan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016:15) :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Pada perusahaan dibidang dagang, jasa, manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap, hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya.

Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut.

Berdasarkan tujuan sistem akuntansi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem akuntansi adalah untuk menyediakan informasi bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik.

2.3.2. Prinsip Dasar dan Konsep Akuntansi

Charles T. Horngren, Walter T. Harrison Jr, dan Linda Smith Bamber (2009) mengatakan bahwa konsep dasar akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Biaya Historis

Prinsip biaya historis merupakan prinsip dalam proses pencatatan akuntansi yang dilakukan berdasarkan harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa.

b. Prinsip Pengakuan Pendapatan

Prinsip pengakuan pendapatan merupakan aliran masuk asset-aset yang muncul dari penyerahan barang atau jasa.

c. Prinsip Mempertemukan

Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang muncul akibat biaya tersebut.

d. Prinsip Konsistensi

Prinsip konsistensi adalah proses akuntansi pencatatan, metode, dan prosedur yang harus dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.

e. Prinsip Pengungkapan Penuh

Prinsip pengungkapan penuh adalah prinsip yang mengatur penyajian informasi laporan keuangan yang lengkap.

f. Prinsip Objektif

Prinsip objektif adalah prinsip yang mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa konsep akuntansi yang harus dipegang oleh para akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan, konsep akuntansi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konsep Entitas Usaha

Konsep entitas usaha merupakan konsep yang membatasi data transaksi dalam sistem akuntansi dengan data yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

b. Konsep Biaya

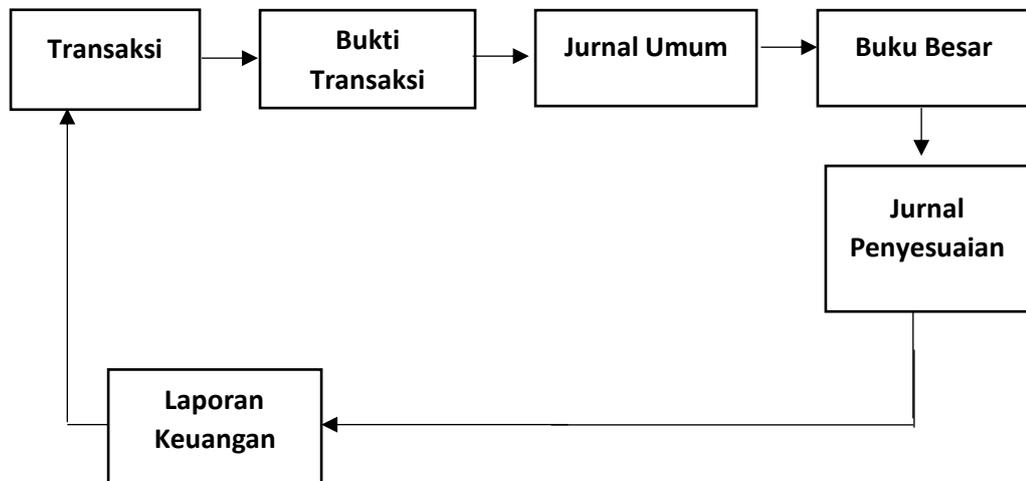
Konsep biaya melibatkan dua konsep akuntansi yaitu konsep objektivitas dan konsep unit pengukuran.

- 1) Konsep objektivitas adalah konsep yang mengatur catatan dan laporan akuntansi agar sesuai berdasarkan pada bukti objektif.
- 2) Konsep unit pengukuran adalah konsep yang mengatur agar data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang.

2.3.3. Siklus Akuntansi

Soemarso S.R mendefinisikan siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus (Soemarso, 2004:90).

Gambar 1 : Siklus Akuntansi



Berdasarkan gambar diatas dapat kita uraikan bahwa siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Proses terjadinya transaksi
- b. Pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi.
- c. Penjurnalan, yaitu menganalisa dan mencatat transaksi ke dalam jurnal.
- d. Memposting ke buku besar yaitu memindahkan angka nominal dari jurnal debit atau kredit ke dalam akun buku besar.
- e. Membuat jurnal penyesuaian dan memasukan jumlahnya pada neraca saldo.
- f. Menyusun laporan keuangan yaitu membuat laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan neraca.

Adapun definisi dari tahapan dalam siklus akuntansi tersebut adalah :

1. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah ataupun berkurang.

2. Bukti Transaksi

Bukti transaksi merupakan dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam semua transaksi yang telah terjadi. Bukti-bukti yang biasanya menjadi dokumen dasar yaitu seperti faktur, kwitansi, nota, dan lain-lain.

3. Jurnal

Jurnal merupakan catatan transaksi-transaksi keuangan yang sistematis dan kronologis berdasarkan bukti transaksi dengan menentukan akun yang akan diletakan pada sisi debet atau dikredit, disertai dengan jumlah nominal masing-masing transaksi dan mencantumkan referensinya.

4. Buku Besar

Buku besar merupakan buku yang berisi tempat pemindahan akun-akun dari jurnal yang berfungsi mengelompokkan akun-akun yang serupa agar lebih mudah untuk diidentifikasi. Buku besar juga berisi berbagai perkiraan yang dapat menyimpulkan adanya transaksi keuangan atas perubahan sejumlah akun seperti aset, kewajiban dan modal.

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dengan tujuan agar saldo menunjukkan jumlah yang sebenarnya, dengan cara melakukan penyesuaian saldo akun-akun ke saldo yang sesungguhnya sampai dengan periode akhir.

Saldo akun yang perlu disesuaikan adalah :

- a) Penyusutan/depresiasi aset tetap
- b) Beban yang masih harus dibayar
- c) Pendapatan diterima dimuka
- d) Piutang pendapatan

6. Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan pemakaiannya.

Adapun Laporan keuangan perusahaan terdiri dari :

A. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi yaitu suatu laporan keuangan yang terkait dengan pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dalam Penyusunan laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut (IAI,2004) :

- 1) Pendapatan
- 2) Laba rugi usaha
- 3) Beban pinjaman
- 4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan

- 5) Beban pajak
- 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
- 7) Pos luar biasa
- 8) Hak minoritas
- 9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

B. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal yaitu penyajian laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik.

Agus Purwaji (2016 : 22) mengatakan bahwa laporan perubahan modal ialah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi. Laporan ini terdiri dari beberapa elemen diantaranya modal awal periode, penambahan dan pengurangan selama 1 periode, dan modal akhir periode.

Unsur perubahan modal berdasarkan PSAK 1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan, dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode berisikan informasi atau berunsurkan sebagai berikut :

- a) Total laba rugi, dengan penyajian yang terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk suatu perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali.
- b) Dampak pada setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen modal. Pada umumnya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode.

- c) Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba / rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik perusahaan. Misalnya seperti tambahan modal atau penarikan modal.
- d) Deviden yang diakui dan jumlah deviden per lembar saham. Pos tersebut bisa juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

C. Neraca

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, modal dan kewajiban pada satu periode tertentu

Suad Husnan dan Enny Pujiastuti menyatakan bahwa neraca adalah menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, kewajiban perusahaan serta modal dasar perusahaan pada waktu tertentu. Kekayaan yang dimaksud disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban modal atau ekuitas disajikan dalam sisi pasiva.

Neraca mempunyai dua bentuk yang digunakan sesuai kebutuhan perusahaan, kedua bentuk tersebut adalah :

1. Bentuk Scontro

Bentuk scontro merupakan neraca bentuk T, yang menyajikan rekening dalam dua sisi, yaitu pada sisi sebelah kiri kelompok aktiva (harta) sedangkan sebelah kanan yaitu dengan kelompok pasiva yang terdiri dari hutang, modal serta prive.

2. Bentuk Staffel

Bentuk staffel merupakan neraca bentuk laporan, dengan susunan yang berurutan dari atas kebawah. Dalam neraca bentuk staffel kelompok aktiva (harta) dicatat pada urutan paling atas sedangkan kelompok pasiva terdiri dari hutang, modal dan prive pada posisi paling bawah

2.4. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.4.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

World Bank membagi UMKM menjadi tiga kriteria berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri.

Berikut tiga kriteria UMKM menurut World Bank :

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan yang tertera dalam UU no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Kriteria UMKM seperti ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, aset yang kekayaan yang dimiliki mencapai Rp. 50.000.000,- dan omset pendapatan pertahunnya mencapai hingga Rp. 300.000.000,-

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil Merupakan usaha yang memiliki karyawan sekitar 5-19 orang. Memiliki aset mulai dari Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-. Dengan omset penjualan pertahunnya mencapai Rp. 300.000.000,- hingga Rp. 2.500.000.000,-

3. Usaha Menengah

Berdasarkan UU, Usaha menengah mempunyai karyawan minimal 20 orang dan maksimalnya 99 orang. Aset kekayaan yang dimiliki oleh usaha menengah mencapai Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-. Omset penjualan per tahun yang diperoleh usaha menengah mencapai Rp. 2.500.000.000,- hingga 50.000.000.000,-

2.4.2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok.

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.4.3. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

2.4.4. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional

Dalam perekonomian Indonesia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting sehingga pemerintah Indonesia pun sangat memperhatikan para pelaku UMKM dengan mendirikan kementerian koperasi dan UMKM.

Peran UMKM mampu memberikan dampak secara langsung kepada kehidupan masyarakat kecil, maka dari itu pemerintah Indonesia sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil, pemerintah memberikan perhatian yang tinggi kepada para pelaku UMKM.

UMKM memiliki 3 peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil yaitu sebagai berikut :

1. Sarana untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan

Peran UMKM dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan yaitu dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Selain dapat mengurangi angka kemiskinan UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran. Hal ini dapat terbukti dalam data milik kementerian koperasi dan UMKM.

2. Sarana dalam meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil

Peran UMKM dalam meratakan perekonomian masyarakat kecil yaitu dengan keberadaannya di 34 provinsi yang ada di Indonesia mampu memperkecil jurang ekonomi antara kalangan atas dan kalangan bawah. Selain itu, masyarakat kecil tidak perlu jauh berbondong-bondong pergi ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

3. Sebagai pemberi devisa bagi Negara

Dengan kemajuan UMKM di Indonesia maka pangsa pasarnya tidak hanya berskala nasional, pasar UMKM juga mampu hingga berskala internasional.

Dengan ketiga peran tersebut maka UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata, dengan peranannya yang sangat membantu meningkatkan perekonomian nasional maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang sangat tinggi agar pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya.